

**KEARIFAN LINGKUNGAN  
SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL  
SEBUAH ULASAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA BORNEO**

Oleh

**M.P. LAMBUT**

**Anak Pribumi Borneo**

*Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Lambung Mangkurat*

..... Di sebuah hutan yang dikelilingi gunung-gunung, hiduplah seorang pemuda dalam kesunyian. Dulu ia adalah seorang raja negeri kaya raya di seberang Sungai Dua....

Ia, dengan kemauannya sendiri, telah meninggalkan singgasana dan kejayaan, untuk mendiami hutan liar itu.

....., " Aku akan mencari laki-laki itu, untuk mengetahui rahasia hatinya, karena ia yang meninggalkan sebuah kerajaan, pasti lebih mulia dari kerajaannya itu. "

(Kahlil Gibran, terjemahan edisi 2000 : 1)

## **I. PENDAHULUAN**

Saya hampir yakin bahwa sayalah satu-satunya peserta Seminar Nasional Pembenahan Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia ini, yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan apalagi menguasai ilmu kehutanan. Saya ini hanyalah sarjana lulusan tahun 1964 Fakultas sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, dan dalam kegiatan akademis di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, mendapat kepercayaan mengasuh mata kuliah Sastra Budaya dan Filsafat. Tugas demikian memang sesuai dengan bidang studi saya ialah Sastra Barat. Dan karena pangkat Guru Besar saya terikat dengan FKIP tempat saya menjadi dosen tetap, saya adalah Guru Besar Pendidikan Sastra – Budaya.

Pengakuan saya yang demikian itu memberi isyarat bahwa makalah yang saya sampaikan pada seminar ini, pasti mempunyai isi dan cara penyajian yang

berbeda dari makalah-makalah lain. Untuk itu saya memang tidak bisa berbuat lain.

Sekedar keterangan tambahan, saya ini putra Indonesia yang lahir dan dibesarkan sebagai anggota masyarakat Dayak Ngaju, kelompok masyarakat Dayak yang paling besar jumlahnya. Bagi masyarakat Dayak Ngaju, hutan dan alam lingkungan merupakan bagian dari pranata kehidupan dunia akhirat.

Dari pihak ayah dan ibu, saya adalah cucu dua orang Demang kepala adat. Dan dari pihak ayah, saya adalah keponakan H.J. Mallinkrodt, penulis buku *Het Adat Recht van Borneo* (1929). Dalam hubungan dan kaitan yang demikian itulah saya hadir dalam seminar ini dan memberanikan diri memenuhi permintaan panitia untuk menyajikan makalah dengan judul : KEARIFAN LINGKUNGAN SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DARI PERSPEKTIF BUDAYA BORNEO.

Untuk mengakhiri pendahuluan ini saya telah mengutip karya Kahlil Gibran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diberi judul Raja Pertama. Kutipan itu memperlihatkan peranan hutan yang sulit sekali diterima oleh kita semua sebagai satu kenyataan. Sebagai karya sastra, mungkin nilainya tinggi, tetapi pasti tidak bernilai bagi ilmu dan kebijaksanaan pengelolaan hutan Indonesia. Namun demikian, karya Kahlil Gibran itu mengisyaratkan bahwa hutan bisa mempunyai arti yang demikian besarnya, sehingga seorang raja bersedia memilih bertapa di hutan lalu meninggalkan istana dan singgasana dengan segala kemegahannya.

## II. BORNEO : *The People of the Weeping Forest, Tradition, and Change in Borneo*

Judul bagian 2 makalah ini adalah judul sebuah buku karya Jan B. Ave dan Viktor King yang diterbitkan oleh National Museum of Ethnology, Leiden 1986, jadi belum terlalu tua untuk dapat dijadikan acuan pada seminar ini. Kedua penulis ini terkenal karena hasil penelitiannya di Borneo baik tentang masyarakat maupun tentang alamnya. Sungguh tepat untuk menyebut hutan di Kalimantan dan Borneo ini sebagai hutan menangis dan bukan lagi hutan kayu keras tropis seperti yang dipaparkan oleh Encyclopedia Winkler – Prins, edisi tahun 1954.

Yang kini tertinggal adalah semak belukar dan padang alang-alang yang dalam setiap saat bisa berubah menjadi lautan api yang maha menyeramkan. Lalu yang dijadikan kambing hitamnya ialah peladang berpindah yang membakar lahan dan merambah hutan sehingga rusak parah. Padahal sejak jaman pra-sejarah sejak manusia purba Borneo mengenal bercocok tanam, mereka adalah peladang dan memang selalu berpindah-pindah, tetapi hutan Borneo tidak pernah hangus dan rusak seperti sekarang ini. Encyclopedia Winkler Prins edisi tahun 1954 masih menyebut kebiasaan berladang berpindah-

pindah, namun hutan kayu kerasnya masih utuh dan terkenal di manca negara. Kini kayu Ulin, Meranti dan sejenisnya sudah mulai menjadi kayu yang langka di tempat yang dahulunya tumbuh dengan subur.

Dari Sarawak, terbit dua buah buku masing-masing dengan judul *Logging Against Natives or Serawak* (1989) dan *The Battle for Sarawak's Forest* (1989). Kedua buku ini memaparkan perlawanan pribumi Sarawak terhadap penghancuran hutan oleh pemegang HPH.

Meskipun saya tidak pernah mempelajari ilmu pengetahuan kehutanan, warisan pengetahuan masyarakat Dayak yang saya kenal melalui tata adat yang berhubungan dengan hutan masih cerah dalam ingatan saya. Saya sudah jarang menginjakkan kaki di kerimbunan hutan rimba raya, namun tata adat warisan leluhur masih berurat berakar dalam jiwa saya.

### III. TATA ADAT ASLI DAN HAK ULAYAT

Banyak pihak berbicara tentang hak ulayat masyarakat atas tanah dan alam lingkungan. Kalau mau jujur, pengertian hak ulayat yang sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya yang bersumber pada agama Islam relatif lebih muda dan lebih sederhana dari tata adat asli masyarakat Borneo. Tata adat asli itu meliputi hubungan timbal balik antara dunia manusia dengan dunia atas dan dunia bawah, hubungan antara sesama manusia dengan sesama hidup, hubungan antara manusia dengan sesama dan hubungan antara manusia yang kini HIDUP dengan manusia yang sudah mati.

Dalam bahasa Ngaju ada istilah *Belom Bahadat* dan *Belom Dia Bahadat* yang dalam bahasa Indonesia berarti *hidup beradat* dan *hidup tidak beradat*.

Hidup beradat adalah hidup damai sejahtera lahir dan batin, hidup berkelanjutan dan berketurunan serta berhari depan yang baik. Sebaliknya hidup tidak beradat adalah hidup yang terhukum, hidup yang tidak merasakan damai sejahtera lahir dan batin, karena tidak ada yang melindungi dan mengayominya. Hidup tidak beradat itu merupakan hidup yang tidak mempunyai masa depan, karena tata adat melawannya dan menghukumnya.

Tata adat merupakan satu kebulatan kekuatan hidup yang kalau ditaati dan dihormati akan menjadi kekuatan yang menghancurkan dan mematikan apabila dilanggar apalagi dilawan dan dilecehkan.

Sumber tata adat adalah mitos penciptaan alam semesta menurut kepercayaan masyarakat pribumi Borneo. Mitos itu menceritakan bagaimana Maha Pencipta itu menciptakan segala sesuatu yang ada dengan cara yang khas untuk masing-masing ciptaan.

Itulah sebabnya, para Demang, kepala adat, para *Balian* pelaksana agama suku, dengan cermat dan setia memelihara dan melestarikan tatanan *Belom Bahadat* di kalangan masyarakat. Kata "Masyarakat" harus dipandang sebagai keseluruhan orang, alam lingkungan, penghuni yang tak berwujud yang

semuanya harus hidup bersama dan berdampingan dengan damai sejahtera. Tidak ada pihak yang lebih penting atau lebih tinggi dari yang lain. Semuanya mempunyai hak *Berada* dan hak itu harus dihormati oleh semua pihak, kalau ingin damai sejahtera. Hanya dengan *Belom Beradat* ada jaminan kedamaian dan kesejahteraan lahir batin.

Mahrus Aryadi dalam tesis untuk mencapai gelar Master Of Tropical Forestry dari Georg August University Of Gottingen Germany tahun 1995 mengutip pendapat saya tentang *Belom Beradat* terhadap hutan. Dalam konsep ini hutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari keabadian hidup. Dan konsep yang demikian itu diungkapkan dalam bahasa Dayak Tua, HUMA yaitu kebulatan hidup yang korporial dan yang inkorporial. Huma adalah tempat bagi yang hidup korporial dan yang inkorporial. Hutan adalah bagian dari HUMA dan Huma meliputi kediaman bersama bagi penghuni yang kini masih hidup dan bagi roh-roh yang tidak kelihatan dan hutan yang menyediakan segala sesuatu untuk kelangsungan hidup semuanya.

Isi atau kekayaan hutan boleh diambil dan digunakan namun cara pengambilan dan atau penggunaannya harus taat pada *Belom Bahadat*. Kalau di hutan ada pohon buah-buahan yang buahnya masak, siapa saja boleh mengambil seperlunya. Orang ini harus menyisakan untuk orang lain dan makhluk lain. Buah cempedak dan atau durian misalnya, selalu ada yang diletakkan di atas tunggul kayu untuk hewan yang bisa memakannya.

Tanaman yang menjuntai di antara pohon-pohon besar tidak boleh dipotong atau dibuang begitu saja, karena tanaman itu mungkin saja *tangga* bagi sesama hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.

Sarang lebah madu hutan, boleh diambil, tetapi sebelum mengambilnya harus lebih dahulu mohon izin mengambilnya. Sesudah meminta izin, sarang dan madu boleh diambil namun harus ada bagian yang ditinggalkan untuk keluarga lebah. Sarang lebah yang penuh madu, harus ditinggalkan di sekitar pohon, agar bisa dinikmati oleh beruang yang suka madu.

Babi hutan, rusa, kijang, tikus, burung, walang sangit, tidak dipandang sebagai *kerabat yang lain* yang juga harus hidup dan berhak hidup. Mereka boleh diburu, namun cara perburuannya harus taat pada tata adat yang patut. Kalau tata adat ini dilanggar, maka pihak yang melanggar akan menerima hukuman yang setimpal.

Kalau ada ladang yang habis ludes dirusak tikus, maka kejadian itu diartikan sebagai pembalasan tikus atas perlakuan yang tidak beradat atasnya. Jadi siapa yang melanggar akan menerima hukuman yang setimpal. Dan kalau ini terjadi, hubungan antara kedua belah pihak harus dipulihkan kembali melalui cara adat pula.

Pohon besar yang dibawahnya tidak terdapat tanaman diartikan sebagai halaman rumah dari makhluk halus, dan oleh karena itu, tidak boleh diganggu. Kalau juga terpaksa harus ditebang misalnya, harus ditebang sesuai dengan

ketentuan adat, agar tidak ada pihak yang rugi dan tidak ada pula keuntungan yang tidak patut.

Dari penjelasan yang demikian itu sangat tidak masuk akal kalau ada anggota masyarakat asli yang mau merusak HUMAnya. Huma bukan hanya milik anggota keluarga yang hidup, tetapi milik anggota keluarga yang telah meninggal, dan juga kediaman roh-roh lain yang memang sudah ada di situ. Selanjutnya, ketaatan atas keadatan mstahil bisa menyebabkan hutan menjadi gundul karena dirambah. Masyarakat asli mempunyai sikap yang jelas, bagaimana membuka, bagaimana menggunakan hutan yang sudah dibuka, bagaimana berpindah dari ladang yang lama ke ladang yang baru. Semua dilakukan dengan kesadaran bahwa kehidupan bersama merupakan satu wujud kehidupan yang harus dipelihara dan dihormati.

#### IV. MASYARAKAT DAN HUTAN

Bagi masyarakat asli, hutan adalah satu jaringan dan jalinan hidup bersama yang penuh dengan rahasia. Itulah sebabnya, hutan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Setiap jengkal hutan harus dipahami dan "suara hutan" harus mdidengar. Yang mampu mendengarnya adalah para *Balian* dan para *Demang* karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih utuh tentang hutan itu.

Masyarakat manusia dapat digolongkan ke dalam sejumlah golongan sesuai dengan hubungannya ke dalam hutan. Ada masyarakat pemukim hutan atau *forest dwellers* yaitu masyarakat asli yang hidup matinya terikat dengan hutan. Hutanlah yang memberinya hidup dan agar hutan dapat menghidupinya, masyarakat ini memelihara hutan sesuai dengan tata adat yang diwarisinya secara turun temurun. Ada bagian hutan yang tidak boleh diganggu gugat dalam bentuk apapun juga. Bagian hutan ini adalah bagian hutan yang diyakini telah dimiliki dan dihuni oleh makhluk lain yang keberadaanya harus dihormati dan diakui. Masyarakat pemukim hutan demikian inilah yang selayaknya dinamakan *masyarakat pribumi* karena menyatu dengan bumi kediamannya yang disebutnya *huma*, dalam bahasa arhaik.

Sayangnya, masyarakat huma itu semakin tidak berdaya ketika peradapan memunculkan masyarakat baru, yaitu *masyarakat produksi* dan *masyarakat kota*. Kedua masyarakat ini bukannya pranata yang direncanakan tetapi merupakan kenyataan yang tak terelakkan. Sebagai pranata yang tidak direncanakan, arah geraknya tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan apapun juga. Lalu muncullah mentalitas baru yaitu mentalitas antroposentris yaitu mentalitas yang menjadikan manusia sebagai penguasa dan penentu segala sesuatu. Bersama dengan itu, norma baik-buruk, benar salah diganti dengan norma-norma baru yang pada dasarnya berlawanan dengan norma masyarakat pribumi.

Bermunculanlah kelompok-kelompok yang secara lahiriah tidak banyak berbeda dari kelompok-kelompok masyarakat pribumi. Kelompok-kelompok baru ini mungkin hidupnya sederhana, seperti juga masyarakat pribumi, tetapi memiliki mentalitas yang sama sekali lain; hutan dipandang sebagai lahan untuk berproduksi.

Istilah *produksi* harus dibedakan secara tuntas dari istilah *penghasilan*. Istilah produksi mengacu pada pemenuhan kebutuhan yang luas dan tanpa batas sedangkan penghasilan mengacu pada pemenuhan kebutuhan yang bersifat pribadi dan terbatas.

*Kelompok masyarakat produksi* ini memandang hutan sebagai sumber yang bisa dimanfaatkan dengan segala cara. Hutan yang mungkin sekali harus menjalani proses yang sangat panjang untuk bisa menjadi hutan yang mengundang minat untuk berproduksi, akhirnya tak berdaya melawan minat untuk berproduksi tanpa henti. Dan hutan yang semula perkasa dan jaya akhirnya menyerah kalah dan berada dalam keadaan nyaris musnah.

Hutan belukar yang semula menutupi sebahagian besar bumi khatulistiwa, dalam waktu yang sangat singkat menghilang lalu diganti oleh padang ilalang atau menjadi bentangan luas yang gundul. Margasatwa yang semula berkelanjutan, makin lama makin tiada nampak lagi dan alam menjadi alam yang sunyi dan lengang di kegerahan terik matahari.

Ketika urbanisasi dan peradapan kota menjadi semakin kuat, mentalitas produksi semakin menguat dan menjadi mentalitas serba materi. Produksi tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bangsa dan negara, tetapi meluas ke pasar dunia yang tak terbatas. Hasil hutan yang kurang menguntungkan di pasaran dunia, bisa saja dibuang ke laut atau dibiarkan rusak hancur, dan orang lalu berburu produk hutan yang lebih menguntungkan secara material. Padahal hutan asalnya tidak dapat dikembalikan seperti semula lagi. Yang lebih menyakitkan adalah masyarakat pribumi dituduh sebagai masyarakat yang merusak hutan, mencemari lingkungan dan menyebabkan munculnya bencana alam. Masyarakat pribumi ini tidak mempunyai cara untuk membela diri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Masyarakat pribumi Borneo, pada umumnya adalah masyarakat sungai dan kehidupan mereka selalu berhubungan dengan sungai. Sungai adalah segala-galanya bagi mereka dan pandangan yang demikian itu mereka warisi turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lain. Kalau demikian, sangat tidak masuk akal kalau mereka dituding sebagai masyarakat yang mencemari sungai. Mereka hidup bersama sungai bukannya baru kemarin atau sepuluh tahun yang lalu, tetapi sejak zaman pra sejarah.

Dari referensi yang digunakan untuk acuan penyusunan makalah ini, baik perlawanan fisik maupun tata keadatan masyarakat pribumi, tidak mampu membendung kerusakan alam lingkungan, khususnya hutan, HUMA MASYARAKAT PRIBUMI.

Kelompok perlawanan Iban, Punan dan Kenyah bersedia mati dilindas traktor, mungkin hanya menjadi tumbal yang sia-sia. Mungkin mereka hanya merupakan realisasi dari tanah tumpah darah, tempat darah benar-benar ditumpahkan demi tanah leluhur. Di hutan rimba raya, pemegang HPH adalah penguasa dan pelaksana hukum rimba yang paling perkasa. Dan anak pribumi hanya bisa memandang dengan kesedihan.

## V. MENTALITAS BARU, MENTALITAS PEMANGSA HUTAN DAN ALAM LINGKUNGAN

Sebagai akibat dari pelecehan atas tatanan kehidupan masyarakat pribumi baik oleh penguasa dan pengusaha muncullah mentalitas baru. Masyarakat pribumi disadarkan oleh kenyataan bahwa tatanan kehidupan mereka yang telah dipelihara turun-temurun tidak memberikan mereka rasa aman. Tatanan itu justru dituduh sebagai biang keladi dari kerusakan dan kemusnahan hutan.

Di lain pihak, mereka BELAJAR bahwa para pendatang, para pemegang HPH, para penguasa yang tidak menghormati adat warisan leluhur, justru hidup damai sejahtera, melahap hutan dan alam lingkungan. Kalau orang lain, orang luar suku bisa selamat, mengapa orang suku menjadi tidak selamat.

Mulailah tumbuh mentalitas baru yaitu mentalitas membenarkan segala cara. Dan mentalitas demikian ini semakin menggejala. Tata adat lama, sedikit demi sedikit ditinggalkan. Dan yang lebih parah lagi ialah tata adat lama itu *disesuaikan* dengan tuntutan baru. Sampai-sampai ada orang Sunda, bisa menjadi *Oloh Balian* rohaniwan agama Dayak. Entah bagaimana rohaniwan asing ini bisa menunjuk jalan ke sorga orang Dayak dan memperkenalkan diri para dewata penguasa sorga.

Kalau orang mau jujur, dimana-mana di tanah Borneo, ada perjudian siang malam, ada pasar minuman keras tanpa batas, ada pusat-pusat pelacuran, ada perompak, dan perampok yang semua beropersi dengan aman dan leluasa. Itulah Borneo, pulau raksasa yang luka parah.

## VI. PEMBENAHAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI ALAM

Dari sudut pendekatan budaya lokal, tidak akan ada jalan sederhana. Budaya yang semula sangat memperhatikan hubungan timbal balik dengan segala sesuatu yang ada, kini berbalik menjadi budaya memangsa dan menjarah. Kehidupan bersama sudah diabaikan lalu kepentingan pribadi semakin menguat. Setiap orang bisa mengatakan *Petak Ayungku*, tanah milikku, padahal tak satupun tata adat memberinya hak demikian. Adat menata kehidupan bersama, kehidupan bermasyarakat, dan bukan hidup individualistis.

Ketika setiap orang menyatakan bahwa dialah pemilik sah tanah atau bagian hutan, atau bagian sungai, maka mulailah muncul ketegangan antar

sesama anggota masyarakat, lalu meluas menjadi ketegangan antar kelompok masyarakat, baik yang sesama pribumi maupun yang bukan sesama pribumi. Ketegangan demikian itu, mudah sekali meledak menjadi tindak kekerasan yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta yang besar.

Kini alam tidak lagi dilindungi. Alam menjadi obyek yang bisa diperlakukan dengan cara apa saja untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Dan alam tentu saja tidak mampu bertahan melawan. Alam lingkungan, hutan belantara mengalami luka parah yang mematikannya.

Luka parah itu semakin parah ketika berhadapan dengan tuntutan kebutuhan materialistis tanpa batas. Baru-baru ini di wilayah Banjarmasin, ada pohon cempedak yang harus ditebang karena berada dalam lintasan jaringan listrik bertegangan tinggi. Pemilik pohon cempedak ini meminta ganti rugi tidak alang kepalang; dia menuntut tiga ratus juta rupiah dari pihak PLN.

Permintaan ganti rugi demikian itu memperlihatkan mentalitas yang sudah sakit parah. Mentalitas demikian itu sudah sangat sukar disembuhkan.

Budaya hidup menerima apa adanya, diganti oleh budaya serba uang. Uang yang semula hanya sarana untuk hidup, kini berubah menjadi tujuan hidup. Harkat dan martabat seseorang diukur dari jumlah uang, jumlah materi yang dimilikinya.

Kini, muncullah dilema baru: budaya peduli hutan yang semakin terkikis dan budaya melahap hutan yang semakin menjadi-jadi. Adakah jalan kembali? Bisakah budaya lama dihidupkan kembali? Kalaupun jawabnya "Ya" siapa yang menuntun kembali ke kearifan budaya leluhur? Para Demang? Kepala Adat? Para sesepuh masyarakat? Aparat desa, kota? Para teknokrat? Para pengusaha? Ataukah perlu ada kearifan budaya baru?

Pengalaman dengan hutan sejak tahun enam puluhan memperlihatkan bahwa tidak ada satupun bentuk pengelolaan hutan alam yang berhasil. Malahan terlihat jelas bahwa semakin banyak jenis kebijaksanaan, semakin rusak dan habis hutan alam itu.

Buku JUKUN-BOATS FROM THE BARITO BASIN BORNEO, karya Eric Petersen, terbitan The Viking Ship Museum Roskilde tahun 2000 dengan jelas mengemukakan bahwa di kawasan Selatan dataran rendah Barito itu, kayu cengal atau *Neobanocarpus heimii* yang digunakan untuk membuat bakal perahu, sudah sangat sulit ditemukan. Kayu Cengal ini termasuk kayu keras dan mampu bertahan di air sampai 60 tahun.

Hutan Cagar Alam Tanjung Putting di kawasan Barat Kalimantan Tengah, kini sudah dirambah masyarakat setempat. Hutan lindung Sultan Adam di Kalimantan Selatan mengalami nasib yang sama. Semuanya memperlihatkan gambaran yang sulit dipercaya, tetapi merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah. Yang semakin menggejala ialah padang alang-alang dan alam yang semakin tak dihuni marga satwa.

Sebagai seorang putra pribumi, penulis sadar betul bahwa burung dan marga satwa liar mempunyai peranan penting menyebarkan biji-bijian hutan ke tempat-tempat yang luas. Kini burung dan marga satwa demikian itu selain diburu, juga mengungsi ke tempat dimana mereka masih bisa bertahan hidup. Dan kenyataan seperti yang dipaparkan tadi, sungguh sulit untuk bisa membenahinya. Lebih-lebih dikala himpitan beban hidup semakin menyakitkan, orang bisa menjadi kehilangan pegangan hidup. Orang dan masyarakat yang semula sangat peduli akan hutan dan lingkungan hidup, kini berbalik menjadi orang yang merambah dan merusak lingkungan hidup. Jangankan lingkungan hidup yang tidak jelas siapa yang menguasainya, tanaman, hutan dan lingkungan yang jelas-jelas ada pengelolanya, tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat. Masyarakat tidak lagi takut diancam oleh siapapun juga; juga tidak takut berhadapan dengan siapapun juga. Malahan dituduh sebagai “pencuri” dan “perusak” sekalipun, mereka tidak gentar.

Perilaku demikian itu, tidak akan mudah dibenahi. Kalaupun bisa, pasti memerlukan waktu, tenaga dan dana besar. Dan apaun juga resikonya, usaha menata perikehidupan menghadapi hutan dan alam lingkungan harus dilakukan sehingga dapat menjadi lebih baik.

## VII. PENUTUP

Kalau semula, ada harapan bahwa warisan budaya leluhur dapat dijadikan kekuatan untuk membenahi pengelolaan hutan alam, kini ternyata bahwa warisan itu sudah nyaris ditinggalkan. Apakah keadaan demikian itu hanya kasus warisan budaya Borneo, penulis tidak memiliki pengetahuan. Dan kalau hanya demikian, permasalahannya tidak terlalu parah. Yang mengerikan ialah kalau keadaan demikian itu adalah keadaan umum yang diderita oleh seluruh warisan budaya masyarakat Indonesia. Yang manapun juga yang sebenarnya, satu hal tidak bisa dipungkiri, masyarakat harus diajak berbicara dalam membina usaha pembenahan pengelolaan hutan alam. Selain dari itu, pengaturan, penetapan, penentuan, harus mempunyai landasan wawasan yang bersumber pada budaya masyarakat. Budaya masyarakat tidak boleh berlawanan dengan kebijaksanaan pengaturan, pengelolaan dan pembenahan. Hanya dengan cara demikian itulah, secara perlahan-lahan masyarakat dapat menemukan kembali jati dirinya yang merupakan penerusan dan budaya warisan leluhur.

Sebagai salah seorang anggota masyarakat pribumi Borneo, penulis yakin bahwa konsep dan kecintaan terhadap HUMA tidak akan pernah musnah dari kehidupan masyarakat. Konsep dan kecintaan terhadap HUMA itulah yang menghidupinya sepanjang jaman. Selama ada HUMA, hidup akan berkelanjutan dan damai sejahtera tetap bisa dinikmati.